

BAB I

PENDAHULUAN

2.1. Latar Belakang

Satu sisi penerapan demokrasi dan desentralisasi politik di Indonesia membawa harapan positif bagi terbentuknya tata kelola pemerintahan daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel (Dahal et al., 2001; Hankla, 2009; Rondinelli, 1983). Namun pada sisi lain, praktik demokrasi dan desentralisasi politik berdampak buruk pada tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia (Dan Slater, 2006). Salah satu dampak buruk penerapan desentralisasi politik terhadap tata kelola pemerintahan daerah adalah maraknya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam formulasi kebijakan anggaran (Ghimire, 2019). Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam formulasi politik anggaran berawal dari perilaku pragmatis elite politik (Shah, 2006; Suprayitno & Pradiptyo, 2017). Dalam hal ini, elit politik lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok daripada kepentingan publik dalam pengambilan keputusan kebijakan anggaran (Jia & Nie, 2015).

Perilaku pragmatis elit politik mendorong elit politik mengedepankan politik kooptasi dan dominasi dalam proses formulasi politik anggaran sehingga kebijakan anggaran berpihak kepada kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tertentu (Rumbul et al., 2018). Kooptasi dan dominasi elit berdampak pada terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkaitan dengan kebijakan anggaran. Dalam hal ini, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme pada penyusunan kebijakan anggaran melibatkan banyak aktor di antaranya pejabat birokrasi, politisi legislatif, politisi partai, pengusaha, dan elit lokal yang berpengaruh seperti preman, tokoh agama, dan aktivis media

(Montambeault & Goirand, 2016). Keterlibatan aktor dalam formulasi politik anggaran tidak lepas dari peran jejaring politik (*political network*) sebagai kekuatan politik yang mendukung tercapainya kepentingan aktor dalam formulasi politik anggaran. Karena itu, semua aktor yang terlibat dalam formulasi politik anggaran berupaya membangun jejaring politik melalui politik pengaruh dan politik dominasi (Rhodes, 2006; David Knoke, 1990).

Pembentukan jejaring politik anggaran melalui politik pengaruh menggambarkan upaya-upaya aktor membangun pengaruh terhadap aktor lain dalam proses politik anggaran (David Knoke, 1990). Dalam konteks demokrasi dan desentralisasi, semua aktor mempunyai kesempatan yang sama dalam pembentukan pengaruh pada setiap tahapan penyusunan kebijakan anggaran daerah. Dalam hal ini, masyarakat, kelompok kepentingan, elit partai, dan pengusaha dapat membangun pengaruh terhadap pejabat birokrasi dan politisi legislatif. Pejabat birokrasi dan politisi legislatif diharapkan dapat menentukan kebijakan anggaran yang berpihak kepada kepentingan publik (Hajer & Hendrik Wagenaar, 2000).

Kendati mempunyai kesempatan yang sama dalam pembentukan politik pengaruh pada setiap tahapan kegiatan penyusunan kebijakan anggaran, tidak semua aktor mampu mengarahkan aktor lain melakukan tindakan yang mendukung pengambilan keputusan atau penetapan kebijakan anggaran sesuai kepentingan aktor yang berpengaruh. Studi terdahulu mengungkapkan bahwa aktor yang berpengaruh dalam formulasi politik anggaran adalah elit politik yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam menentukan kebijakan anggaran. Pejabat birokrasi dan politisi legislatif dapat menentukan kebijakan anggaran sesuai kepentingan elit politik (Aspinall & Fealy, 2003a; Aspinall & Klinken van, 2017). Dalam hal ini, pejabat birokrasi dan politisi legislatif mengajak aktor lain terlibat dalam formulasi politik anggaran untuk mendukung keputusan elit politik (Grillos, 2017;

Rumbul et al., 2018; Sheely, 2015a). Dalam formulasi politik anggaran, lembaga eksekutif mempunyai pengaruh yang lebih kuat daripada lembaga legislatif namun melalui politik kartel, lembaga legislatif mampu mengarahkan lembaga eksekutif sehingga kebijakan anggaran berpihak kepada kepentingan partai afiliasi politisi legislatif (Farhan, 2018).

Aktor lain yang berpengaruh dalam formulasi politik anggaran adalah sektor swasta (pengusaha) (Aspinall & Fealy, 2003a). Meskipun sektor swasta tidak mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam menentukan kebijakan anggaran, namun sektor swasta mempunyai pengaruh yang kuat dalam mengendalikan dan mengarahkan keputusan elit politik yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan di lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sehingga kebijakan anggaran berpihak kepada kepentingan sektor swasta (Aspinall & Klinken van, 2017; Migdal, 1998; Sidel, 2005; Tans, 2011). Pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif secara langsung menuntut politisi mempunyai modal ekonomi yang mendukung kemenangan pemilihan kepala daerah atau pemilihan legislatif. Karena itu, politisi perlu membangun jejaring politik dengan pemilik modal. Dalam hal ini, pemilik modal mendukung finansial politisi dengan syarat politisi mempunyai komitmen yang tinggi mendukung kepentingan bisnis pemilik modal di wilayah kekuasaan politisi (Aspinall & Klinken van, 2017). Kemudian, politisi yang berhasil memenangkan Pilkada dan Pileg yang mendapatkan dukungan finansial dari pemilik modal berusaha menyusun kebijakan anggaran yang berpihak kepada kepentingan pemilik modal (Davidson, 2015).

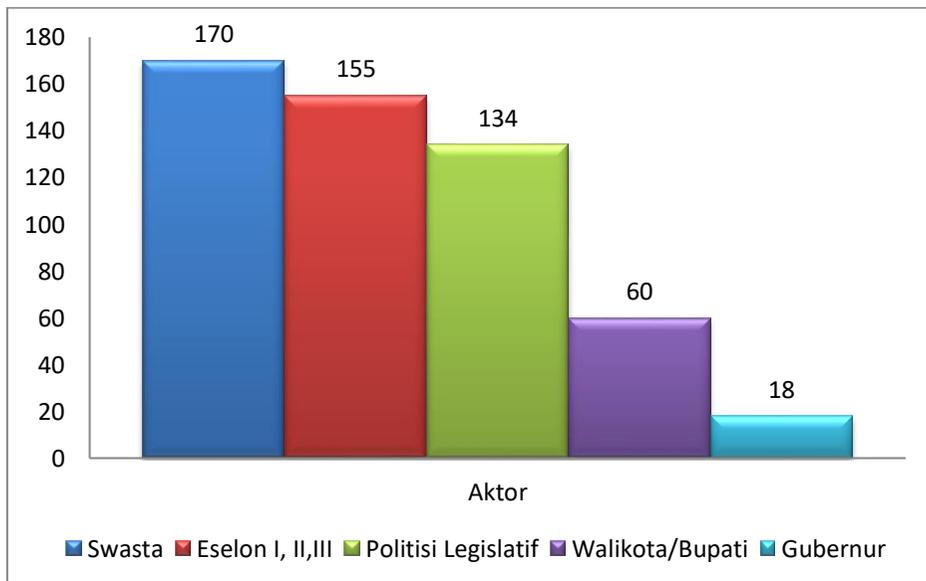
Berdasarkan temuan penelitian terdahulu seperti yang diuraikan di atas, aktor yang berpengaruh dalam formulasi politik anggaran adalah aktor yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan di lembaga eksekutif dan lembaga legislatif serta pemilik modal yang memiliki sumber daya finansial yang dibutuhkan oleh politisi sebagai sumber daya pendukung

pemenangan Pilkada dan pemilihan legislatif (Mendilow et al., 2018). Sementara aktor *civic groups* atau kelompok kepentingan berusaha terlibat dalam jejaring politik formulasi politik anggaran namun aktor kelompok kepentingan tidak mempunyai kekuatan yang cukup kuat untuk mempengaruhi pejabat birokrasi dan politisi legislatif dalam formulasi politik anggaran (Cook, 2013). Karena itu, aktor kelompok kepentingan menempatkan diri sebagai *client* dari jejaring politik politisi lembaga eksekutif dan politisi legislatif. Sebagai *client* politisi, aktor *civic groups* dan kelompok kepentingan berupaya membangun komunikasi dan interaksi transaksional dengan politisi yang berkuasa di lembaga eksekutif dan lembaga legislatif (Montambeault & Goirand, 2016).

Kekuatan politik pengaruh elit politik yang mempunyai kekuasaan di lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dalam penyusunan kebijakan anggaran tidak terlepas dari politik dominasi yang mereka miliki (Arias, 2018). Sebagai aktor yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan di lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, elit politik mempunyai kemampuan dominasi dalam mengarahkan aktor lain pada setiap tahapan penyusunan kebijakan anggaran (Sjahrir et al., 2013). Melalui kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki, elit politik dapat memaksa aktor lain menerima kebijakan anggaran yang ditetapkan oleh elit politik. Karena itu, pembentukan jejaring politik melalui politik dominasi tidak terdapat ruang dialog dan komunikasi antar aktor (David Knoke, 1990, 2000; Knoke, 1990). Aktor yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan di lembaga pemerintahan berposisi sebagai pihak yang dominan, sementara aktor lain berposisi sebagai pihak yang tidak mempunyai kekuatan politik (*powerless actors*) dalam formulasi politik anggaran (Montambeault & Goirand, 2016). Jejaring politik dominasi cenderung memberikan peluang bagi elit politik mengedepankan politik transaksional yang menguntungkan aktor yang mempunyai kekuasaan

dan kewenangan dalam urusan kebijakan anggaran (Basri & Nabiha, 2014).

Sejalan dengan politik dominasi yang dijelaskan di atas, kasus korupsi anggaran di Indonesia melibatkan aktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan, seperti pengusaha, pejabat birokrasi, dan politisi parlemen. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sejak tahun 2004 hingga 2017 aktor swasta menduduki peringkat korupsi yang paling atas (170 tindak pidana korupsi), kemudian disusul aktor penguasa (pejabat tinggi eselon I, II, III) (155 tindak pidana korupsi), politisi legislatif (134 tindak pidana korupsi), walikota/bupati (60 tindak pidana korupsi), dan gubernur (18 tindak pidana korupsi) (KPK, 2019).



Grafik 1.1 Tindak Pidana Korupsi Aktor berdasarkan Profesi/jabatan 2004-2017

Sumber: Diolah dari data Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017.

Grafik 1.1. di atas menegaskan bahwa aktor swasta (pemilik modal) dan aktor penguasa (pejabat birokrasi dan politisi legislatif/walikota/bupati/gubernur) sangat rentan bertindak korup dalam formulasi politik anggaran, karena kedua aktor tersebut mempunyai pengaruh dan dominasi yang paling kuat daripada aktor lain seperti *civic groups*. Data KPK tersebut juga menunjukkan bahwa proses pembentukan jejaring politik baik melalui politik pengaruh maupun melalui politik dominasi cenderung melahirkan jejaring politik yang menguntungkan elit politik dan pemilik modal serta menempatkan aktor *civics groups* dan kelompok kepentingan sebagai pihak yang tidak berdaya secara politik (Salahudin et al., 2017).

Proses pembentukan jejaring politik anggaran melalui politik pengaruh dan politik dominasi menggambarkan adanya transaksi kepentingan (*political exchange*) antara aktor dalam proses pengambilan keputusan (Compston, 2009; Rhodes, 2006; Sørensen & Torfing, 2003). Politisi yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan di lembaga eksekutif dan di lembaga legislatif membutuhkan legitimasi sosial politik dari aktor organisasi informal seperti kelompok kepentingan, tokoh masyarakat, dan aktivis sosial politik. Sementara aktor organisasi informal membutuhkan akses sumber daya seperti anggaran, program dan kegiatan pemberdayaan dari pemerintah dan politisi legislatif.

Perbedaan kebutuhan dan kepentingan mendorong aktor politisi lembaga pemerintah dan aktor organisasi informal melakukan pertukaran sumber daya politik (*informal political exchange*), yakni pemerintah dan politisi memberikan aktor organisasi informal sumber daya anggaran, program dan kegiatan pemerintah (Compston, 2009). Sementara aktor organisasi informal memberikan dukungan politik terhadap keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan politisi legislatif (Farhan, 2018). Pada lain pihak, pemilik modal dari sektor swasta memberikan pemerintah, politisi, dan aktor organisasi informal anggaran yang mendukung eksistensi mereka dalam arena

kekuasaan (Dorotinsky & Pradhan, 2007). Karena itu, pemerintah dan politisi menetapkan kebijakan anggaran yang mendukung kepentingan pemilik modal (Sidel, 2016; Montambeault & Goirand, 2016).

Jejaring politik anggaran yang dielaborasi di atas menggambarkan jejaring politik clientalism dan politik kartel (Allen, 2015; Aspinall & Fealy, 2003a; Aspinall & Klinken van, 2017; Berenschot, 2018c). Jejaring clientalism politik menggambarkan hubungan antara *patron* dan *client*. Patron adalah aktor yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan di lembaga pemerintahan. Pada umumnya patron mempunyai pengaruh dan dominasi yang kuat dalam menentukan kebijakan anggaran sehingga *patron* dapat menyusun dan menetapkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada kepentingan politik, bisnis, dan organisasi serta komunitas pendukung (Klinken, 2008). Sementara *client* adalah aktor yang tidak mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang cukup kuat dalam pengambilan keputusan kebijakan anggaran, namun dalam konteks ini *client* berperan sebagai pendukung patron untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan di lembaga pemerintahan (Mendilow et al., 2018).

Partai kartel merupakan salah satu aktor yang memosisikan diri sebagai *client* (Tans, 2012). Dalam hal ini, partai kartel tidak mempunyai kekuatan politik yang cukup kuat di lembaga pemerintahan, namun mereka berupaya menjadi bagian dari jejaring politik partai yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan publik (Kuskridho Ambardi, 2008). Dengan demikian, partai kartel dapat memperoleh anggaran dari pemerintah (*patron*) untuk mendukung keberlangsungannya sebagai partai politik (Fisher & Eisentadt, 2004). Dukungan client terhadap patron didasari kepentingan pragmatis dan transaksional (Aspinall & Klinken van, 2017). Dalam hal ini, akses *client* dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pelayanan publik bergantung pada kedekatan *client* terhadap *patron* (Grindle, 2016). Studi terdahulu mengungkapkan bahwa jejaring politik clientalism dan

jejaring politik kartel dalam formulasi politik anggaran berpengaruh pada maraknya tindakan korupsi, kolusi, dan praktik suap antara aktor (Farhan, 2018; Montambeault & Goirand, 2016).

Mengacu pada elaborasi jejaring politik aktor dalam kebijakan anggaran yang dijelaskan di atas, penelitian ini hendak mengkaji jejaring politik praktik korupsi anggaran di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Tindak korupsi dan praktik suap dalam politik anggaran di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu menggambarkan adanya jejaring politik (*political network*) yang mendukung politik anggaran berlangsung melalui mekanisme informal berupa pertukaran sumber daya antara pejabat politik eksekutif, pejabat birokrasi, politisi legislatif, dan pemilik modal. Dalam hal ini, penelitian ini memetakan peran aktor dalam politik anggaran di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Pemetaan peran aktor dalam politik anggaran dilakukan untuk mengidentifikasi aktor yang dominan dan berpengaruh dalam praktik korupsi politik anggaran di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

Selanjutnya, penelitian ini hendak mendiskusikan proses pembentukan jejaring politik melalui politik pengaruh dan politik dominasi antara aktor dalam politik kebijakan anggaran di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya di atas, aktor yang berpengaruh dan aktor yang dominan dalam politik anggaran adalah aktor yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan di lembaga eksekutif dan di lembaga legislatif. Aktor lain yang berpengaruh dalam politik anggaran adalah pemilik modal dan elit partai. Kendati pemilik modal dan elit partai tidak mempunyai kekuasaan dan kewenangan di lembaga pemerintahan namun mereka mempunyai kekuatan politik ekonomi yang cukup kuat mengendalikan keputusan elit politik. Dalam konteks politik pengaruh dan politik dominasi, organisasi informal seperti civic groups, kelompok kepentingan, aktivis, dan tokoh masyarakat memposisikan diri sebagai *client* dari aktor yang

berpengaruh dan dominan (kepala daerah, DPRD, dan pemilik modal) dalam formulasi politik anggaran. Dalam hal ini, penelitian ini juga hendak mendeskripsikan aktor yang berpengaruh dan aktor yang dominan dalam politik anggaran di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

Politik anggaran di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu menggambarkan jejaring politik clientalisme, politik kartel, dan elite capture yang mendorong terjadinya praktik korupsi. Karena itu, penelitian ini juga mengkaji hubungan jejaring politik clientalism, politik kartel, dan elite capture terhadap praktik korupsi politik anggaran di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Karena itu, penelitian ini juga perlu melakukan analisis klaster peran *patron*, *client*, pemilik modal, dan elit partai dalam praktik korupsi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Konsep *political network* digunakan untuk menjelaskan jejaring politik praktik korupsi anggaran di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

2.2. Masalah Penelitian

Masalah penelitian ini adalah *jejaring politik menggambarkan interaksi dan pertukaran sumber daya politik antara aktor melalui mekanisme informal dalam bentuk clientalisme, politik kartel, dan elite capture yang berpengaruh pada praktik korupsi anggaran*. Karena itu, pertanyaan penelitian ini adalah: **Mengapa jejaring politik menyebabkan praktik korupsi anggaran di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu?** Pertanyaan ini diuraikan ke dalam sub pertanyaan berikut.

1. Bagaimana proses terbentuknya jejaring politik praktik korupsi anggaran di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu?
2. Bagaimana relasi aktor dalam jejaring politik praktik korupsi anggaran di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu?

3. Bagaimana pengaruh jejaring politik *clientalisme*, politik kartel, dan *elite capture* terhadap praktik korupsi anggaran di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu?

2.3. Tujuan Penelitian

Disertasi ini disusun untuk menjelaskan proses pembentukan jejaring politik praktik korupsi anggaran di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan proses terbentuknya jejaring politik praktik korupsi anggaran di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu?
2. Untuk menjelaskan relasi aktor dalam jejaring politik praktik korupsi anggaran di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu?
3. Untuk mengetahui pengaruh jejaring politik *clientalisme*, politik kartel, dan *elite capture* terhadap praktik korupsi politik anggaran di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu?

2.4. Manfaat Penelitian

Sejumlah penelitian terdahulu tentang politik anggaran di Indonesia lebih banyak diarahkan pada kajian partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan anggaran (APBD) seperti penelitian yang dilakukan oleh Basri & Nabiha, 2014; Hadi Sasana, 2017; Sopanah, 2012; Widianingsih & Morrell, 2007. Dalam hal ini, konseptual framework dari sejumlah penelitian terdahulu menggunakan pendekatan *participatory budgeting* sehingga eksplorasi penelitian terbatas pada upaya memahami keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan kegiatan penyusunan APBD. Konsekuensi dari keterbatasan eksplorasi tersebut adalah temuan penelitian tidak menggambarkan jejaring politik aktor

yang menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat dalam politik anggaran. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi keterbatasan penelitian terdahulu yang difokuskan pada kajian jejaring politik praktik korupsi anggaran.

Konsep *political network* digunakan untuk menjelaskan proses pembentukan jejaring politik praktik korupsi anggaran. Dengan demikian, penelitian ini dapat menggambarkan secara jelas relasi, interaksi, dan pertukaran sumber daya antara aktor yang berlangsung dalam politik anggaran di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Penggunaan pendekatan *political network* pada penelitian ini menegaskan bahwa penelitian ini menerapkan pendekatan yang belum banyak digunakan oleh penelitian terdahulu. Karena itu, penelitian ini hendak memberikan kontribusi pada ketersediaan pendekatan baru dalam penelitian politik anggaran, khususnya penelitian politik anggaran pada tingkat daerah di Indonesia.

Pada sisi metodologi, penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif analisis konten dokumen dengan software Nvivo 12 plus. Tujuan penerapan pendekatan analisis konten pada penelitian ini ialah untuk memahami dan menjelaskan jejaring politik praktik korupsi anggaran yang diuraikan secara jelas dalam dokumen putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang praktik pidana korupsi di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Analisis jejaring politik korupsi anggaran dengan Software Nvivo 12 Plus belum banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu. Karena itu, penelitian ini hendak memberikan kontribusi pada pengembangan metode penelitian analisis jejaring politik korupsi pada aspek pendekatan analisis konten dengan software Nvivo 12 Plus.

Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan akademisi bahwa kebijakan anggaran dipengaruhi oleh jejaring politik yang di dalamnya terdapat relasi, interaksi, dan komunikasi aktor dalam setiap tahapan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran. Keterlibatan aktor secara proposional memberikan dampak positif bagi kebijakan anggaran daerah, sebaliknya dominasi peran aktor berdampak pada buruknya tata kelola kebijakan anggaran daerah yang berpengaruh pada praktik korupsi dan praktik suap yang berdampak pada buruknya pembangunan daerah.

Kendati penelitian ini menghadirkan pendekatan *political network* dan penggunaan Nvivo 12 plus yang belum banyak digunakan pada penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek pengujian statistik variabel dan indikator yang berpengaruh terhadap pembentukan *political network* dan terhadap tindakan korupsi dan praktik suap dalam politik anggaran.

2.5. Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini adalah analisis jejaring korupsi politik anggaran di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu meliputi:

1. Proses terbentuknya jejaring politik praktik korupsi anggaran di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.
2. Relasi aktor dalam jejaring politik praktik korupsi anggaran di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.
3. Formasi jejaring politik praktik korupsi anggaran di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.
4. Pengaruh jejaring politik terhadap praktik korupsi anggaran di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

2.6. Sistematika Disertasi

Penelitian ini disusun berdasarkan pada permasalahan praktik korupsi dan praktik suap dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Jejaring politik di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu mengakibatkan terjadinya

praktik korupsi dan praktik suap dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti menyusun kajian pustaka jejaring politik praktik korupsi anggaran. Teori *political network* dari Knoke (1999) digunakan sebagai *grand theory* untuk memahami proses pembentukan jejaring politik kebijakan anggaran. Konsep *elite capture*, *clientalism*, dan politik kartel digunakan untuk mendeskripsikan formasi *political network* yang berpengaruh pada praktik korupsi dan praktik suap kebijakan anggaran di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Berdasarkan literature review yang disusun, peneliti menyusun model penelitian (*research model*) sebagai *theoretical framework* penelitian ini.

Berdasarkan permasalahan penelitian, kajian pustaka, dan model penelitian yang disusun, peneliti menyusun desain penelitian meliputi menentukan pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Desain penelitian disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian “mengapa jejaring politik berpengaruh pada terbentuknya *clientalisme*, politik kartel, dan *elite capture* yang mengakibatkan terjadinya tindakan korupsi kebijakan anggaran di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu?”

Penelitian ini terdiri dari tujuh Bab, yakni BAB I Pendahuluan, BAB II Literature Review, BAB III Metodologi Penelitian, BAB IV Proses Pembentukan Jejaring Politik Praktik Korupsi Kebijakan Anggaran, BAB V Relasi Aktor dalam Jejaring Politik Praktik Korupsi Kebijakan Anggaran, BAB VI Formasi dan Pengaruh Jejaring Politik terhadap Praktik Korupsi Kebijakan Anggaran, dan BAB VII Ringkasan Temuan, Kesimpulan, Implikasi, dan Rekomendasi Penelitian. Sistematika lengkap penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1. Sistematika Disertasi

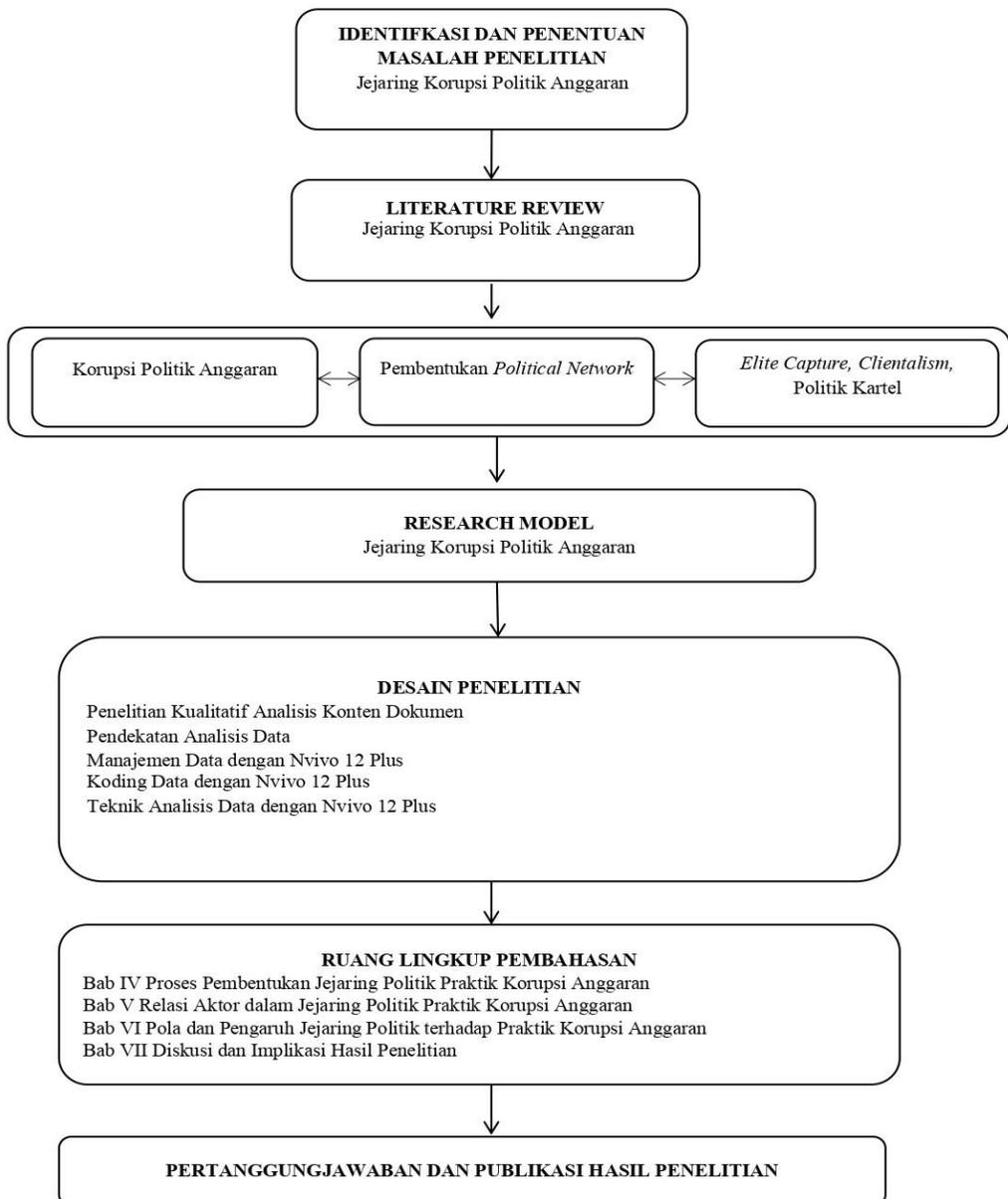
BAB I	:	PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Masalah Penelitian 1.3. Tujuan Penelitian 1.4. Manfaat Penelitian 1.5. Ruang Lingkup Penelitian 1.6. Sistematika Disertasi
BAB II	:	LITERATURE REVIEW 2.1. Korupsi Politik Anggaran 2.2. <i>Political Network</i> : Pembentukan Formasi Political Network 2.2.1. <i>Elite Capture</i> : Dominasi elite politik dalam formulasi politik anggaran 2.2.2. <i>Clientalism Politics</i> : Relasi antara <i>patron, client</i> , dan pemerintah dalam formulasi politik anggaran 2.2.3. <i>Cartelism Politics</i> : Relasi antara partai cartel, partai dominan, dan pemerintah. 2.3. Jejaring Korupsi Politik dan Rent-seeking Kebijakan Anggaran 2.4. Theoretical Framework Jejaring Politik Anggaran. 2.5. Hipotesis Penelitian Jejaring Politik Anggaran. 2.6. Taksonomi Literature Jejaring Politik Anggaran. 2.7. Definisi Konsep dan Definisi Operasional Penelitian Jejaring Aktor Formulasi Anggaran.
BAB III	:	METODOLOGI PENELITIAN 4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian 4.2. Desain Penelitian

		<p>4.3. Pendekatan Penelitian</p> <p>4.4. Pendekatan Analisis Data dengan Nvivo 12 Plus</p> <p>4.5. Manajemen Data dengan Nvivo 12 Plus</p> <p>4.6. Coding Data dengan Nvivo 12 Plus</p> <p>4.7. Teknik Analisis Data dengan Nvivo 12 Plus</p> <p> 4.7.1. Analisis dengan Fitur Crosstab</p> <p> 4.7.2. Analisis dengan Fitur Chart</p> <p> 4.7.3. Analisis dengan Fitur Hierarchy Chart</p> <p> 4.7.4. Analisis dengan Fitur Cluster Analysis</p> <p> 4.7.5. Analisis dengan Fitur Sociogram (Social Network Analysis)</p> <p>4.8. Uji Faliditas Data dengan Nvivo 12 Plus</p>
BAB IV	:	<p>PROSES PEMBENTUKAN JEJARING POLITIK PRAKTIK KORUPSI KEBIJAKAN ANGGARAN</p> <p>4.1. Pendahuluan</p> <p>4.2. Proses Pembentukan Jejaring Politik Praktik Korupsi Anggaran</p> <p> 4.2.1. Politik Dominasi Pembentukan Jejaring Politik Praktik Korupsi Anggaran</p> <p> 4.2.2. Politik Pengaruh Pembentukan Jejaring Politik Praktik Korupsi Anggaran</p> <p>4.3. Peran Aktor dalam Jejaring Politik Praktik Korupsi Anggaran</p> <p> 4.3.1. Peran Aktor dalam Jejaring Politik Praktik Korupsi Anggaran di Kota Malang</p> <p> 4.3.2. Peran Aktor dalam Jejaring Politik Praktik Korupsi Anggaran di Kabupaten Malang</p> <p> 4.3.3. Peran Aktor dalam Jejaring Politik Praktik Korupsi Anggaran di Kota Batu</p>

BAB V	:	<p>RELASI AKTOR DALAM JEJARING POLITIK PRAKTIK KORUPSI ANGGARAN</p> <p>5.1. Pendahuluan</p> <p>5.2. Relasi Aktor dalam Jejaring Politik Praktik Korupsi Anggaran di Kota Malang</p> <p>5.3. Relasi Aktor dalam Jejaring Politik Praktik Korupsi Anggaran di Kabupaten Malang</p> <p>5.4. Relasi Aktor Jejaring Politik Praktik Korupsi Anggaran di Kota Batu</p>
BAB VI	:	<p>FORMASI DAN PENGARUH JEJARING POLITIK TERHADAP PRAKTIK KORUPSI ANGGARAN</p> <p>6.1. Pendahuluan</p> <p>6.2. Formasi Jejaring Politik Praktik Korupsi Anggaran</p> <p>6.2.1. Jejaring Clientalism Politik Anggaran</p> <p>6.2.2. Jejaring Politik Kartel Kebijakan Anggaran</p> <p>6.2.3. Jejaring Elite Capture Kebijakan Anggaran</p> <p>6.3. Pengaruh Jejaring Politik <i>Clientalism</i>, Politik Kartel, dan <i>Elite Capture</i> terhadap Praktik Korupsi Kebijakan Anggaran</p>
BAB VII	:	<p>DISKUSI DAN IMPLIKASI PENELITIAN</p> <p>7.1. Proses Pembentukan Jejaring Politik Praktik Korupsi Anggaran</p> <p>7.2. Relasi Aktor dalam Jejaring Politik Praktik Korupsi Anggaran</p> <p>7.3. Formasi dan Pengaruh Jejaring Politik terhadap Praktik Korupsi Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>7.4. Implikasi Studi Analisis Jejaring Politik Praktik Korupsi Pengelolaan Keuangan Daerah</p>

BAB VIII	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 8.1. Kesimpulan 8.2. Rekomendasi
---------------------	--

Bagan 1.1. Tahapan Desain Penelitian Disertasi



2.7. Publikasi Ilmiah

1. Elite Capture of Budget Corruption in Three Indonesian Regions telah diterbitkan pada Public Policy Administration Journal (terindek scopus, Q2).
2. How to Design Qualitative Research with NVivo 12 Plus for Local Government Corruption Issues in Indonesia? Pada Journal of Government and Politics (JGP) (Sinta 2).